

Model Tata Kelola Metropolitan Kepulauan: Studi Kasus Kota Baubau Menuju Transformasi Berkelanjutan

Archipelagic Metropolitan Governance Model: A Case Study of Baubau City Towards Sustainable Transformation

Herie Saksono

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR), Mataram, Lombok, NTB

<https://doi.org/10.46891/kainawa.6.2024.101-111>

Abstrak

Wilayah kepulauan menghadapi tantangan unik dalam pembangunan berkelanjutan, seperti keterbatasan aksesibilitas, kerentanan perubahan iklim, dan ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kondisi ini memerlukan pendekatan berbeda dari wilayah daratan. Dalam upayanya bertransformasi menjadi Metropolitan Kepulauan yang inklusif, Kota Baubau berada di pusat dinamika kepulauan di Sulawesi Tenggara. Konsep "metropolitan islands" telah diidentifikasi, namun implementasinya di Indonesia masih terbatas, khususnya terkait model tata kelola metropolitan untuk wilayah kepulauan. Terdapat kesenjangan penelitian terkait model tata kelola metropolitan yang spesifik untuk kawasan berciri kepulauan. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi pengembangan model metropolitan kepulauan berkelanjutan. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengusulan konsep "Adaptive Islands Metropolis," yang mengintegrasikan unsur-unsur ketahanan perkotaan, konektivitas kepulauan, dan inovasi ekologis. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus Kota Baubau diterapkan sembari memanfaatkan data tematik dari kebijakan, statistik, dan literatur akademik. Analisis data difokuskan pada tiga aspek utama: (1) karakteristik spasial dan demografis, (2) dinamika sosial-ekonomi, dan (3) fungsi kemaritiman sebagai penggerak pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan metropolitan kepulauan Kota Baubau mencakup 455 pulau (33,74% wilayah Sulawesi Tenggara) dengan populasi 1.220.390 jiwa (43,68% populasi provinsi). Hal ini mengungkapkan bahwa Kota Baubau memiliki tantangan kompleks dalam membangun konektivitas pulau-pulau utama di kawasan metropolitan seluas 12.200,81 km². Meskipun disparitas pembangunan antarpulau signifikan, konsentrasi populasi sebesar 43,68% dari total penduduk Sulawesi Tenggara menunjukkan potensi besar bagi pengembangan. Teridentifikasi empat fungsi kemaritiman utama, yakni: ekonomi, keamanan-keselamatan, sosial-organisasi, dan inovasi-pengembangan metropolitan kepulauan. Lebihnya disparitas IPM (66,94-79,00) mengindikasikan perlunya strategi pemerataan Pembangunan di wilayah kepulauan agar dapat mendorong pertumbuhan berbasis maritim. Kesimpulannya, transformasi Baubau menjadi metropolitan kepulauan berkelanjutan memerlukan strategi adaptif yang memadukan peningkatan konektivitas, inovasi perkotaan berbasis ekologi, dan penguatan ekonomi kepulauan terpadu. Model ini menjadi solusi strategis untuk menghadapi tantangan kepulauan dan mendorong pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan. Studi ini merekomendasikan pembentukan Badan Koordinasi Metropolitan Kepulauan, pengembangan klaster industri maritim, penguatan klaster ekonomi maritim, pengelolaan infrastruktur terintegrasi, dan peningkatan konektivitas antarpulau melalui infrastruktur dan teknologi digital, serta implementasi kebijakan inklusif berbasis karakteristik kepulauan.

Kata Kunci

Metropolitan Kepulauan; Pembangunan Inklusif; Kesejahteraan; Wilayah Kepulauan; Kota Baubau.

Abstract

Archipelagic regions face unique challenges in sustainable development, such as limited accessibility, vulnerability to climate change, and disparities in interregional development. These conditions require a distinct approach compared to mainland areas. As it aims to transform into an inclusive Archipelagic Metropolitan, Baubau City is positioned at the heart of the archipelagic dynamics in Southeast Sulawesi. The concept of "metropolitan islands" has been identified but remains under-implemented in Indonesia, particularly regarding governance models tailored for archipelagic metropolitan areas. There is a research gap concerning governance models specifically designed for archipelagic regions. This study explores the development of a sustainable archipelagic metropolitan model. The novelty of this research lies in proposing the concept of an "Adaptive Islands Metropolis," integrating elements of urban resilience, archipelagic connectivity, and ecological innovation. A qualitative approach with a case study design in Baubau City is applied, utilizing thematic data from policies, statistics, and academic literature. Data analysis focuses on three key aspects: (1) spatial and demographic characteristics, (2) socio-economic dynamics, and (3) maritime functions as drivers of inclusive development. The findings reveal that Baubau's archipelagic metropolitan region encompasses 455 islands (33.74% of Southeast Sulawesi's territory) with a population of 1,220,390 (43.68% of the provincial population). This indicates that Baubau City faces complex challenges in enhancing connectivity among the primary islands within a metropolitan area spanning 12,200.81 km². Although significant disparities in inter-island development exist, the population concentration of 43.68% of Southeast Sulawesi's total population highlights substantial potential for development. Four key maritime functions are identified: economic, security-safety, social-

organization, and innovation-driven metropolitan development. The significant disparity in the Human Development Index (HDI) (ranging from 66.94 to 79.00) underscores the need for equitable development strategies to promote maritime-based growth. In conclusion, Baubau's transformation into a sustainable archipelagic metropolitan area requires adaptive strategies that combine enhanced connectivity, ecological urban innovation, and integrated island-based economic development. This model serves as a strategic solution to address archipelagic challenges and foster inclusive and sustainable development. The study recommends the establishment of an Archipelagic Metropolitan Coordination Agency, the development of maritime industry clusters, the strengthening of maritime economic clusters, the management of integrated infrastructure, the enhancement of inter-island connectivity through infrastructure and digital technology, and the implementation of inclusive policies based on archipelagic characteristics.

Keywords

Metropolis Islands; Inclusive Development; Well-being; Archipelagic Regions; Baubau City.

Penulis korespondensi: Herie Saksono (herie.saksono26@gmail.com)

Hak cipta: © 2024 Penulis.

Karya ini dilisensikan di bawah lisensi **Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional** 

Bagaimana mengutip artikel ini: Saksono, H. (2024). Model Tata Kelola Metropolitan Kepulauan: Studi Kasus Kota Baubau Menuju Transformasi Berkelanjutan. *Kainawa: Jurnal Pembangunan dan Budaya*, 6(2), 101-111. <https://doi.org/10.46891/kainawa.6.2024.101-111>

1. Pendahuluan

Wilayah kepulauan memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari wilayah daratan, seperti keterbatasan aksesibilitas, kerentanan terhadap perubahan iklim, dan disparitas pembangunan. Kota Baubau, sebagai pusat dinamika kepulauan di Sulawesi Tenggara, menghadapi tantangan dalam upayanya bertransformasi menjadi metropolitan kepulauan. Beberapa literatur menyoroti pentingnya model tata kelola yang spesifik untuk wilayah kepulauan (Baldacchino, 2008; Grydehøj, 2017a), tetapi implementasinya masih terbatas di Indonesia. Begitu pula Razin & Charney (2015a) yang mengidentifikasi konsep "metropolitan island state", namun relatif terbatas pengimplementasiannya di negara kepulauan. Hal ini terjadi karena adanya kesenjangan dalam literatur terkait model tata kelola metropolitan yang secara khusus dirancang untuk wilayah kepulauan seperti Indonesia. Karenanya, studi ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan mengajukan kerangka konseptual "Adaptive Islands Metropolis" yang mengintegrasikan ketahanan perkotaan, konektivitas kepulauan, dan inovasi ekologis.

Kota Baubau, sebagai bagian dari kota berciri kepulauan Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam upayanya bertransformasi menjadi metropolitan kepulauan. Terminologi "Metropolitan Kepulauan" dipilih untuk meneguhkan adalah terminologi yang digunakan untuk menutupi bahwa problematika yang kerap dan lumrah terjadi di wilayah berciri kepulauan adalah kelangkaan dan keterbatasan aksesibilitas, kerentanan terhadap perubahan iklim, ketimpangan pembangunan antarpulau, dan kompleksitas dalam mengelola dinamika sosial-ekonomi perkotaan dalam konteks kepulauan. Kadaan ini seringkali memicu terjadinya ketimpangan antarwilayah dan antarpulau, sehingga turut menimbulkan tantangan ekologi (Baldacchino, 2020; Grydehøj, 2017b; Wibisono et al., 2019a).

Persoalan kelangkaan dan keterbatasan akses telah menuntun sejumlah wilayah kepulauan di berbagai negara untuk menyediakan sarana-prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya yang selayaknya wajib tersedia di kota pulau, pulau-pulau, atau bahkan di wilayah kepulauan. Sebab, keterhubungan wilayah kepulauan dan antarpulauanya menjadi urgen dalam pengelolaan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan. Studi ini bertolak dari ketiadaan kerangka konseptual yang spesifik-komprehensif untuk mengembangkan metropolitan kepulauan berkelanjutan. Fernandes & Pinho (2017a) telah mengidentifikasi sifat khas pembangunan spasial di pulau-pulau kecil (PPK), namun belum secara spesifik mengeksplorasi dinamika metropolitan kepulauan. Sementara, Tomàs & Pyka (2023) membahas model tata kelola metropolitan konvensional yang belum mengakomodasi karakteristik wilayah kepulauan.

Celah ini memicu kuriositas "Bagaimana mengembangkan model metropolitan kepulauan yang berkelanjutan dengan mempertimbangkan karakteristik spasial, sosio-ekonomi, dan fungsi kemaritiman?" Terminologi "Metropolitan Kepulauan (Archipelagic Metropolitan)", mengacu pada wilayah metropolitan dengan karakteristik archipelagic (kepulauan). Konsep ini untuk mendeskripsikan kawasan pesisir, PPK, laut, dan kepulauan dengan karakteristik spesifik, kekhasan, dan keunikannya yang berpadu dengan perilaku dan kehidupan manusia. Istilah tersebut menggambarkan integrasi antara wilayah metropolitan dengan karakteristik spasial dan demografis kepulauan, dimana konektivitas antarpulau dan fungsi maritim menjadi elemen utama dalam tata kelola kawasan yang mengakomodasi tantangan geografis dan sosial-ekonomi yang khas.

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis perkembangan area metropolitan kepulauan, dengan studi kasus Kota Baubau dan wilayah sekitarnya. Secara spesifik, studi ini

mengeksplorasi: (1) karakteristik spasial dan demografis wilayah kepulauan, (2) dinamika sosial-ekonomi dan pembangunan manusia, serta (3) fungsi kemaritiman sebagai penggerak pembangunan inklusif. Secara teoretis, studi ini didasarkan atas teori besar pembangunan berkelanjutan wilayah kepulauan yang dikembangkan (Wallner et al., 1996). Teori ini menekankan pendekatan bottom-up dalam mencapai keberlanjutan di wilayah kepulauan. Pada tataran teori rentang menengah, diadopsi konsep konektivitas dan aksesibilitas pulau dari Karampela et al. (2014a) yang melihat peran krusial transportasi dalam membentuk geografi baru wilayah kepulauan. Dalam prakteknya, digunakan model fungsi kemaritiman dari Branch & Stopford (2013a) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, keamanan, sosial, dan inovasi dalam pembangunan wilayah maritim.

Upaya menemukan kebaruan dalam studi ini terletak pada integrasi tiga kerangka teoritis untuk mengembangkan model metropolitan kepulauan berkelanjutan. Berbeda dari studi sebelumnya – Nurhaeny & Miharja (2019a) yang fokus pada konsep “urban island”, atau Boeing (2016) yang mengkaji konektivitas transportasi metropolitan, studi ini menghadirkan perspektif komprehensif tentang tata kelola metropolitan kepulauan. Inovasi konseptual ini diperkuat oleh analisis empiris dari Wolters et al., (2013a) tentang skenario fungsi ekonomi maritim dan temuan Chen & Dong (2019a) tentang indikator pembangunan berkelanjutan untuk kota kepulauan.

Urgensitas studi ini semakin relevan mengingat tren urbanisasi global sebagaimana telah diidentifikasi Ulrike (2015) dan tantangan perubahan iklim yang dibahas oleh Soete (2022). Simmie (1998) menekankan pentingnya inovasi dalam pengembangan wilayah, sementara Doloreux (2017a) menggarisbawahi peran klaster maritim. Chen & Dong (2019) mengulas sistem indikator pembangunan berkelanjutan untuk kota-kota kepulauan, dan semakin menarik ketika diintegrasikan dengan studi Cardoso & Meijers (2021) yang mengulas proses metropolisasi yang dapat memperkuat argumen tentang perlunya pendekatan holistik dalam pengelolaan wilayah kepulauan. Elaborasi atas temuan Tomàs & Pyka (2023) yang membahas model, kebijakan, dan proses politik serta dinamika dalam tata kelola metropolitan semakin memperkaya pemahaman tentang kompleksitas tata kelola metropolitan secara umum sebelum masuk ke konteks kepulauan. Begitu pula dengan gagasan Razin & Charney (2015) yang mengkaji dinamika metropolitan di Israel sebagai "metropolitan island state", menjadi relevan untuk mengomparasi pendekatan, perbedaan karakteristik, dan tantangan yang dihadapi Indonesia dengan pengalaman internasional.

Pengintegrasian aneka perspektif ini menciptakan kerangka analitis baru untuk memahami dan mengelola metropolitan kepulauan secara berkelanjutan. Kontribusi teoretis dan praktis studi ini sejalan dengan visi yang disampaikan Grydehoj (2017c) tentang masa depan studi kepulauan. Dari sisi teoretis, kajian ini semakin memperkaya literatur tentang tata kelola metropolitan dengan perspektif kepulauan. Secara praktis, temuan studi dapat menjadi rujukan untuk formulasi kebijakan pembangunan wilayah pesisir, PPK, laut, dan kepulauan, khususnya dalam konteks metropolitan kepulauan yang berkelanjutan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus Kota Baubau untuk mengeksplorasi pengembangan model metropolitan kepulauan yang berkelanjutan. Kota Baubau dipilih karena karakteristik uniknya sebagai penggerak interaksi perekonomian kepulauan. Kota Baubau diharapkan menjadi Metropolitan Kepulauan yang berkelanjutan dan mampu menjadi hub Pembangunan, khususnya bagi daerah berciri kepulauan yang terletak di

sekitar Kota Baubau, dimana terkoneksi langsung melalui fungsi kamaritiman di Kawasan Timur Indonesia (KTI). Dalam konteks ini, diidentifikasi dan dipetakan dinamika sosial, ekonomi, dan kondisi ekologis di wilayah kepulauan yang terkoneksi melalui wilayah laut di sekeliling Kota Baubau.

3. Hasil dan Pembahasan

Sebagai wilayah berciri kepulauan, Kota Baubau menghadapi tantangan konektivitas antar pulau yang mempengaruhi mobilitas penduduk dan distribusi aneka sumber daya. Data menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antara pulau utama dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Sementara potensi pengembangan sektor maritim dan pariwisata belum dioptimalkan sepenuhnya. Analisis tematik dalam upaya menyiapkan Kota Baubau sebagai Metropolitan Kepulauan menghasilkan 3 (tiga) tema utama, yakni: (1) karakteristik spasial dan demografis wilayah kepulauan, (2) dinamika sosial-ekonomi dan pembangunan manusia, serta (3) penguatan fungsi kamaritiman sebagai penggerak pembangunan inklusif.

Secara kolaboratif, Pemerintah Bersama-sama dengan pemda berciri kepulauan menyiapkan Masterplan Metropolitan Kepulauan. Rencana induk menjadi acuan Bersama untuk merealisasikan Metropolitan Kepulauan sebagai Pusat Maritim Berkelanjutan di KTI dan membangun ekosistem perkotaan kepulauan yang inklusif, berbasis konservasi lingkungan, agar mampu membangun ketahanan kota berciri kepulauan yang spesifik dan responsif terhadap perubahan iklim, serta menjamin kualitas konektivitas antarpulau yang lebih aman, nyaman, ekonomis, efektif, dan efisien untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Studi ini lebih difokuskan pada daerah otonom yang dipandang memiliki ciri kepulauan, yakni wilayah administrasi pemerintahan kabupaten/kota yang selain memiliki wilayah daratan, juga mempunyai wilayah laut, pesisir (coastal area), dan/atau terdapat pulau-pulau kecilnya (PPK) yang saling terhubungkan satu dengan lainnya melalui wilayah laut, serta berada dalam satu kawasan disekitar 2 (dua) pulau besar, yakni: 1) Pulau Buton; dan 2) Pulau Muna. Berdasarkan letak dan posisinya secara geografis, maka teridentifikasi 10 (sepuluh) daerah kabupaten/kota, dimana wilayahnya terletak dalam radius kawasan disekitar Pulau Buton dan Pulau Muna.

3.1. Karakteristik Spasial dan Demografis Wilayah Kepulauan

Studi ini mengidentifikasi 3 (tiga) tema utama yang saling terkoneksi dalam membentuk karakteristik metropolitan kepulauan. Pertama, pola spasial dan demografis yang unik, di mana 455 pulau tersebar dalam kawasan seluas 12.200,81 km² dengan konsentrasi aktivitas Kota Baubau yang terletak di sebelah Tenggara jazirah Pulau Sulawesi. Karakteristik spasial dan demografis Kawasan Metropolitan Kepulauan Baubau menjadi platform unik yang harus dikelola dengan pendekatan khusus. Sebab, dalam kawasan tersebut tersebar 455 pulau di area seluas 12.200,81 km² (33,74% wilayah Sulawesi Tenggara), kawasan ini membutuhkan strategi konektivitas yang berbeda dari metropolitan konvensional di wilayah daratan. Temuan ini diperkuat argumen Fernandes & Pinho (2017c) tentang kekhasan pembangunan spasial di wilayah kepulauan, sekaligus mengkonfirmasi teori Baldacchino (2006a) tentang peran strategis pusat pertumbuhan dalam pengembangan wilayah hinterland kepulauan.

Pemahaman tentang kondisi wilayah paska pemekaran daerah menjadi fundamental dalam merumuskan strategi pembangunan Metropolitan Kepulauan. Data karakteristik spasial dari 10 kabupaten/kota yang teridentifikasi dalam kawasan metropolitan ditelisik dari aspek keberadaannya, konektivitas antarwilayah, jumlah kecamatan, kelurahan/desa, dan pulau

dalam konteks kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sajian data Tabel 1 menjadi basis untuk memahami tantangan konektivitas dan aksesibilitas dalam pengembangan metropolitan kepulauan.

Tabel 1. Kondisi Wilayah Paska Pemekaran Daerah di Kawasan P. Buton dan P. Muna

Kabupaten/Kota	Dasar Hukum Pembentukan Daerah Otonom (Waktu)	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Luas Wilayah (%)	Persentase Luas Wilayah dari Total Luas Sultra (%)	Kec.	Kel.	Desa	Pulau
Buton	UU No. 29/1959	1.669,329	13,68	4,62	7	12	83	46
Muna	UU No. 29/1959	1.858,095	15,23	5,14	22	26	124	198
Bombana	UU No. 29/2003	3.293,966	27,00	9,11	22	22	121	26
Wakatobi	UU No. 29/2003	450,456	3,69	1,25	8	26	75	142
Buton Utara	UU No. 14/2007	1.755,829	14,39	4,86	6	12	78	31
Konawe Kepulauan	UU No. 13/2013	705,711	5,78	1,95	7	7	89	2
Muna Barat	UU No. 14/2014	818,702	6,71	2,26	11	5	81	1
Buton Tengah	UU No. 15/2014	836,956	6,86	2,31	7	10	67	4
Buton Selatan	UU No. 16/2014	517,631	4,24	1,43	7	10	60	-
Kota Baubau	UU No. 13/2001	294,137	2,41	0,81	8	43	-	5
Kawasan Metropolitan Kepulauan	-	12.200,81	100,00	33,74	105	173	778	455
Sulawesi Tenggara	UU No. 13/1964 UU No. 7/2022	36.159,71	-	-	221	379	1.908	590

Sumber: Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau; Buku Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024. BPS; dan Dokumen Peraturan Perundang-undangan. Data Diolah. 2024.

Berdasarkan Tabel 1, Kota Baubau menjadi magnet Kawasan Metropolitan Kepulauan yang mencakup 455 pulau yang tersebar di 10 kabupaten/kota dalam wilayah seluas 12.200,81 km² atau 33,74% dari total luas Provinsi Sulawesi Tenggara. Karakteristik spasial yang unik ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan Fernandes & Pinho (2017d) tentang sifat pembangunan spasial yang khas di pulau-pulau kecil. Dinamika wilayah ini mencerminkan kompleksitas pengelolaan wilayah kepulauan sebagaimana dibahas Grydehoj (2017d) dalam konteks studi kepulauan masa depan.

Sekalipun wilayah Kota Baubau hanya seluas 294,137 km² atau menjadi yang terkecil di kawasan tersebut, namun Kota Baubau memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yakni 572,99 orang/km². Situasi ini memungkinkan terciptanya interaksi berintensitas tinggi dengan wilayah pesisir, PPK, laut, dan kepulauan disekitarnya. Hal ini mengonfirmasi temuan Baldacchino (2006b) tentang strategi ideal pengembangan ekonomi wilayah PPK, dimana konsentrasi aktivitas di daratan utama (pusat kota) dapat mendorong pertumbuhan wilayah hinterland. Tersebarnya 173 kelurahan/desa di kawasan metropolitan mengindikasikan perlunya penguatan konektivitas antarwilayah yang sejalan dengan konsep Wolters et al., (2013b) tentang pentingnya fungsi transportasi maritim dalam pengembangan wilayah kepulauan. Karenanya, transformasi wilayah kepulauan dalam metropolitan kepulauan harus ditetapkan sebagai acuan perencanaan pembangunan daerah berbasis ekonomi biru. Temuan

ini menegaskan perlunya strategi konektivitas antarpulau yang efektif, sebagaimana diusulkan Karampela et al., (2014b).

3.2. Dinamika Sosial-Ekonomi dan Pembangunan Manusia

Perkembangan manusia dan situasi kependudukan menjadi aspek vital dalam pembangunan metropolitan kepulauan. Dinamika sosial-ekonomi ditandai oleh disparitas pembangunan manusia antarwilayah pesisir, laut, PPK, dan kepulauan yang memiliki potensi besar dengan terkonsentrasi 43,68% populasi provinsi di kawasan metropolitan kepulauan. Keadaan ini menunjukkan adanya disparitas pembangunan yang signifikan sebagaimana tercermin dari rentang skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 66,94-79,00. Total populasi yang bermukim di area ini mengindikasikan potensi besar untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis maritim. Keadaan ini sejalan dengan konsep MacLachlan & Behavior (2017a) tentang pengelolaan SDM maritim dan selaras dengan temuan Chen & Dong (2019c) mengenai indikator pembangunan berkelanjutan untuk kota kepulauan.

Data Tabel 2 merupakan potret komprehensif tentang kondisi demografis dan pembangunan manusia di kawasan metropolitan kepulauan yang mencakup populasi, laju pertumbuhan penduduk, densitas, dan komponen IPM. Data ini esensial untuk mengidentifikasi disparitas antarwilayah dan merumuskan kebijakan pemerataan pembangunan. Dengan total populasi mencapai 43,68% dari penduduk Sulawesi Tenggara, pemahaman mendalam tentang kondisi kependudukan menjadi kunci untuk merancang strategi pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kepulauan.

Tabel 2. Kondisi Penduduk Kabupaten/Kota di Kawasan P. Buton dan P. Muna 2024

Kabupaten/ Kota	Populasi (Jiwa)	Persentase Penduduk dari Total Populasi (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2024 (%)	Densitas (Org./ Km2)	IPM 2023				
					UHH	HLS	RLS	Pengeluaran (Rp.000)	IPM
Buton	122.030	4,37	1,55	73,10	70,36	13,88	8,49	7.995	68,96
Muna	227.980	8,16	1,51	122,70	71,56	14,02	8,53	8.703	70,62
Bombana	160.650	5,75	1,72	48,77	70,88	11,90	8,07	9.132	68,12
Wakatobi	118.260	4,23	1,61	262,53	70,76	13,52	8,51	10.240	71,45
Buton Utara	69.800	2,50	1,24	39,75	71,36	13,17	9,12	8.289	69,85
Konawe Kep.	39.690	1,42	1,85	56,24	70,25	12,54	9,45	7.564	68,11
Muna Barat	90.960	3,26	1,95	111,10	71,17	12,62	7,86	8.076	67,44
Buton Tengah	121.290	4,34	1,48	144,92	70,37	13,20	7,34	8.003	66,94
Buton Selatan	101.190	3,62	1,62	195,49	70,14	13,26	7,65	7.936	67,19
Kota Baubau	168.540	6,03	1,52	572,99	74,53	15,52	11,02	11.207	79,00
Kawasan Metropolitan Kepulauan	1.220.390	43,68							
Sulawesi Tenggara	2.793.070	100,00	1,67	77,24	71,79	13,70	9,31	10.117	72,94
Indonesia									

Sumber: Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Angka 2024 dan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2023. BPS. Data Diolah. 2024.

Tabel 2 menunjukkan bahwa Kawasan Metropolitan Kepulauan menampung 43,68% (1.220.390 jiwa) dari total penduduk Sulawesi Tenggara. Kota Baubau sebagai pusat metropolitan mencatat IPM tertinggi (79,00) dengan komponen unggulan pada angka harapan hidup (74,53 tahun), harapan lama sekolah (15,52 tahun), dan pengeluaran per

kapita (Rp11.207.000). Capaian ini merefleksikan argumentasi sebagaimana dikemukakan Chen & Dong (2019d) tentang pentingnya sistem indikator pembangunan berkelanjutan bagi kota-kota kepulauan.

Sekalipun konsentrasi 43,68% dari total populasi Provinsi Sulawesi Tenggara bermukim di kawasan ini dan menunjukkan potensi besar untuk pembangunan berbasis maritim, namun IPM masing-masing daerah berada pada rentang 66,94–79,00. Keadaan ini merefleksikan adanya disparitas antarwilayah. Karenanya strategi peningkatan aksesibilitas dan penguatan kompetensi SDM maritim menjadi prioritas utama (Maclachlan & Behavior, 2017b). Hal ini sejalan dengan temuan Karampela et al. (2014c) tentang pentingnya aksesibilitas dalam membentuk geografi baru berbasis moda dan pilihan transportasi di wilayah kepulauan. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif seragam (1,24-1,95% per tahun) menunjukkan potensi pengembangan SDM yang perlu diarahkan pada penguatan kompetensi maritim seperti usulan Maclachlan & Behavior (2017c).

3.3. Penguatan Fungsi Kemaritiman sebagai Penggerak Pembangunan Inklusif

Dalam metropolitan kepulauan, fungsi kemaritiman berperan sentral untuk menggerakkan pembangunan di wilayah kepulauan. Urgensi pengembangan fungsi kemaritiman yang terintegrasi meliputi aspek ekonomi, keamanan-keselamatan, sosial-organisasi, dan inovasi-pengembangan sebagai fondasi pembangunan inklusif. Hasil identifikasi empat (4) fungsi kemaritiman utama (ekonomi, keamanan-keselamatan, sosial-organisasi, dan inovasi-pengembangan) menjadi kerangka operasional yang adaptif dalam kerangka pengembangan metropolitan kepulauan berkelanjutan. Wolters et al. (2013) dan Branch & Stopford (2013) menyoroti pentingnya pengembangan ekonomi maritim, termasuk pelayaran komersial, pengelolaan pelabuhan, dan pariwisata bahari. Integrasi fungsi keamanan dan keselamatan, sebagaimana diusulkan Weinrit & Neumann (2013), menjadi penting mengingat karakteristik wilayah yang tersebar. Selain itu, inovasi melalui penelitian dan pengembangan klaster maritim dapat meningkatkan daya saing kawasan (Doloreux, 2017).

Pemetaan 4 (empat) fungsi utama kemaritiman dan aktivitasnya yang spesifik penting dikembangkan dalam konteks metropolitan kepulauan sebagaimana Tabel 3. Kerangka ini dikonstruksi dari sintesis berbagai perspektif pakar tentang pembangunan kemaritiman dengan catur fungsinya. Pemetaan fungsi kemaritiman menjadi panduan strategis optimasi potensi sumber daya di wilayah pesisir, laut, PPK, dan kepulauan yang menjadi penghubung antarwilayah sekaligus penggerak ekonomi kawasan metropolitan kepulauan.

Tabel 3 mengidentifikasi catur fungsi kemaritiman utama yang perlu dikembangkan dalam konteks Metropolitan Kepulauan. Fungsi ekonomi yang mencakup pelayaran komersial, pengelolaan pelabuhan, industri maritim, perikanan, dan pariwisata bahari diintegrasikan dengan ekonomi maritim. Aspek keamanan dan keselamatan maritim sebagaimana usulan Weinrit & Neumann (2013b) menjadi krusial mengingat karakteristik wilayah yang tersebar dalam 455 pulau. Sementara itu, fungsi sosial dan organisasi yang dikemukakan Maclachlan & Behavior, (2017e) perlu diperkuat melalui pengembangan SDM dan sistem kesehatan-keselamatan kerja maritim. Doloreux (2017c) menekankan pentingnya inovasi melalui penelitian, pengembangan klaster, sinergi, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan maritim untuk mendorong daya saing antarwilayah dalam kawasan metropolitan kepulauan. Kerangka fungsi kemaritiman perlu diimplementasikan secara terintegrasi agar tercipta pembangunan inklusif yang mendorong kesejahteraan masyarakat kepulauan. Hal ini

Tabel 3. Fungsi Kemaritiman dalam Metropolitan Kepulauan

Pakar	Fungsi	Aktivitas
Wolters et al. (2013d) Branch & Stopford (2013c)	Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayaran komersial dan transportasi laut 2. Pengelolaan pelabuhan dan logistik 3. Industri maritim dan galangan kapal 4. Perikanan dan akuakultur 5. Pariwisata bahari
Urbański et al. (2009) Weinrit & Neumann (2013a)	Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan wilayah maritim 2. Sistem navigasi dan keselamatan pelayaran 3. Perlindungan lingkungan maritim 4. Penanganan keadaan darurat di laut
MacLachlan & Behavior, (2017d)	Sosial & Organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manajemen sumber daya manusia maritim 2. Kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan maritim 3. Pengembangan kompetensi maritim
Doloreux (2017b) Relling et al., (2018)	Inovasi dan Pengembangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penelitian dan pengembangan teknologi maritim 2. Pengembangan klaster maritim 3. Integrasi sistem otonomisasi maritim 4. Kolaborasi antar pemangku kepentingan maritim

Sumber: Berbagai Sumber. Data Diolah. 2024.

sejalan dengan visi pengembangan Metropolitan Kepulauan yang berkelanjutan sebagaimana saran Cross et al. (2017) dalam konteks keberlanjutan jangka panjang sistem kepulauan.

Rangkaian pembahasan ini mengarahkan pada temuan yang menginspirasi perspektif baru tentang kompleksitas dan potensi pengembangan metropolitan di wilayah kepulauan. Berbeda halnya dengan metropolitan konvensional yang berkembang di wilayah daratan, Upaya merealisasikan "Metropolitan Kepulauan Baubau" memerlukan pendekatan khusus yang mengintegrasikan karakteristik kepulauan dalam fungsi-fungsi metropolitan dan kemaritiman. Analisis mendalam terhadap ketiga tema tersebut mengungkap adanya pola interaksi yang khas antara wilayah pusat di daratan utama (mainland) dan hinterland yang dihubungkan oleh wilayah laut, menciptakan dinamika pembangunan yang berbeda dari metropolitan berbasis daratan. Pemahaman atas temuan-temuan ini menjadi krusial dalam merumuskan strategi pembangunan yang adaptif terhadap karakteristik wilayah kepulauan sekaligus agenda responsif atas kebutuhan masyarakat. Usulannya, Kota Baubau menjadi "Adaptive Islands Metropolis" yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ketahanan perkotaan, konektivitas kepulauan, dan inovasi ekologis dalam konteks spesifik kepulauan nusantara. Model ini menawarkan kerangka kerja baru untuk menavigasi tantangan unik yang dihadapi kota-kota kepulauan dalam proses metropolisasi, dengan mempertimbangkan aspek-aspek krusial sebagaimana dibahas Nurhaeny & Miharja (2019b) dan Cardoso & Meijers (2021).

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Simpulan penting terkait pengembangan model metropolitan kepulauan dengan studi kasus Kota Baubau dan wilayah sekitarnya menawarkan kerangka konseptual "Adaptive Islands Metropolis" yang mengintegrasikan ketahanan perkotaan berciri kepulauan, konektivitas kepulauan, dan inovasi ekologis untuk mengatasi tantangan geografis, ekologis, dan sosial-

ekonomi yang dihadapi Baubau dan daerah sekitarnya dalam mengembangkan pembangunan di wilayah kepulauan. Pertimbangan ini menuntun proses transformasi Kota Baubau sebagai metropolitan kepulauan yang membutuhkan strategi adaptif yang memadukan peningkatan konektivitas, inovasi perkotaan berbasis ekologi, pelestarian lingkungan, dan penguatan ekonomi kepulauan secara terpadu.

Keterpaduan antara Pembangunan infrastruktur dan pelestarian ekosistem menjadi prioritas utama yang harus dilandaskan pada regulasi yang kokoh dan implementatif. Melalui pembangunan transportasi yang ramah lingkungan, implementasi teknologi hijau, dan pemberdayaan sosio-ekonomi, akan terstimulasi Pembangunan inklusif yang berupaya menjaga keseimbangan antara Upaya peningkatan konektivitas dan kelestarian ekologi, sehingga terjaga kearifan lokal, terbentuknya penguatan identitas lokal, hingga mewujudnya masyarakat yang lebih Makmur dan sejahtera.

4.2. Rekomendasi

Pandangan yang direkomendasikan kepada Pemerintah antara lain: 1) melembagakan Badan Koordinasi Metropolitan Kepulauan yang diperkuat dengan sistem tata kelola kolaboratif antardaerah kepulauan dan penguatan kapasitas SDM manajemen wilayah maritim; 2) penciptaan inovasi ekonomi maritim melalui pengembangan klaster industri maritim berbasis potensi lokal, termasuk penguatan sektor pariwisata bahari berkelanjutan dan optimalisasi sektor perikanan dan kelautan; 3) mengembangkan infrastruktur terintegrasi berupa penguatan fasilitas pelabuhan sebagai simpul pertumbuhan ekonomi kepulauan; 4) pembangunan sistem transportasi multi-moda yang menghubungkan 455 pulau yang didukung penguatan infrastruktur digital untuk meningkatkan konektivitas antarpulau; dan 5) menyiapkan kebijakan inklusif dan berkelanjutan yang mempertimbangkan karakteristik kepulauan, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator keberlanjutan, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan kepulauan.

Dalam penelitian selanjutnya disarankan mengeksplorasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan metropolitan kepulauan dan mengkaji potensi teknologi smart city dalam konteks kepulauan disertai upaya mengembangkan indikator kinerja spesifik dalam rangka evaluasi pembangunan metropolitan kepulauan di Indonesia.

Ucapan Terima Kasih

Apresiasi dan terima kasih disampaikan kepada Penjabat (Pj.) Wali Kota Baubau, Bapak Dr. Muh. Rasman Manafi, SP., M.Si. dan kepada Bapak Drs. Rahmat Tuta, M.Si., selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Baubau beserta jajarannya dan kepada seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Baubau yang sangat kooperatif dan berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan pendalaman, diskusi, menggali ide/gagasan, dan berbagi pemikiran dalam penguatan agenda kelitbangda di Kota Baubau 2024, sehingga sangat dirasakan kemanfaatannya untuk memperkaya khazanah penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui publikasi artikel ilmiah ini.

Referensi

- Baldacchino, G. (2006). Small islands versus big cities: lessons in the political economy of regional development from the world's small islands. *The Journal of Technology Transfer*, 31, 91–100.
- Baldacchino, G. (2008). Studying islands: On whose terms?: Some epistemological and methodological challenges to the pursuit of island studies.
- Baldacchino, G. (2020). How far can one go?: how distance matters in island development.
- Boeing, G. (2016). Honolulu Rail Transit: International Lessons from Barcelona in Linking Urban Form, Design, and Transportation. *Planext*, 2(2016), 28–47. <https://doi.org/10.17418/planext.2016.3vol.02>
- Branch, A., & Stopford, M. (2013). *Maritime economics*. Routledge.

- Cardoso, R., & Meijers, E. (2021). Metropolisation: the winding road toward the citification of the region. *Urban Geography*, 42(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/02723638.2020.1828558>
- Chen, Q., & Dong, H. (2019). Sustainable development indicator systems for island cities: The case of zhoushan maritime garden city. *Island Studies Journal*, 14(2), 137–156. <https://doi.org/10.24043/isj.103>
- Cross, S., Padfield, D., Ant-Wuorinen, R., King, P., & Syri, S. (2017). Benchmarking island power systems: Results, challenges, and solutions for long term sustainability. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 80(July 2016), 1269–1291. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.05.126>
- Doloreux, D. (2017). What is a maritime cluster? *Marine Policy*, 83(June), 215–220. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.06.006>
- Fernandes, R., & Pinho, P. (2017). The distinctive nature of spatial development on small islands. *Progress in Planning*, 112, 1–18.
- Grydehøj, A. (2017). A future of island studies. *Island Studies Journal*, 12(1), 3–16.
- Karampela, S., Kizos, T., & Spilanis, I. (2014). Accessibility of islands: Towards a new geography based on transportation modes and choices. *Island Studies Journal*, 9(2), 293–306.
- MacLachlan, M., & Behavior, H. (2017). Maritime Psychology. In *Maritime Psychology*. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-45430-6>
- Nurhaeny, A., & Miharja, M. (2019). Urban Island Concept and The Relevance for Archipelagic States: Case of Ambon City-Maluku Province. *International Conference on Maritime and Archipelago (ICoMA 2018)*, 173–177.
- Razin, E., & Charney, I. (2015). Metropolitan dynamics in Israel: An emerging “metropolitan island state”? *Urban Geography*, 36(8), 1131–1148. <https://doi.org/10.1080/02723638.2015.1096117>
- Simmie, J. (1998). Reasons for the development of “islands of innovation”: evidence from Hertfordshire. *Urban Studies*, 35(8), 1261–1289. <https://doi.org/10.1080/0042098984358>
- Soete, A. (2022). Islands: Rising seas, vulnerable shorelines, and territorial integrity. In *Routledge Handbook of Marine Governance and Global Environmental Change* (pp. 164–174). Routledge.
- Tomàs, M., & Pyka, R. (2023). Metropolitan governance: models, policies and political processes. In *Frontiers in Political Science* (Vol. 5, p. 1322633). Frontiers Media SA.
- Ulrike, C. (2015). The Metropolitan Century - UNDERSTANDING URBANISATION AND ITS CONSEQUENCES - Policy Highlights. Organisation for Economic Co-operation and Development PP - France. <https://policycommons.net/artifacts/3817301/the-metropolitan-century/>
- Urbański, J., Morgiaś, W., & Mięsikowski, M. (2009). The present and expected changes in maritime safety, security and defense functions. *Marine Navigation and Safety of Sea Transportation*, 3(1), 3–8. <https://doi.org/10.1201/9780203869345.ch1>
- Wallner, H. P., Narodoslawsky, M., & Moser, F. (1996). Islands of sustainability: a bottom-up approach towards sustainable development. *Environment and Planning A*, 28(10), 1763–1778.
- Weinrit, A., & Neumann, T. (2013). Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation. *Marine Navigation and Safety of Sea Transportation: Advances in Marine Navigation*, 1–313.
- Wibisono, H., Musthofa, A., Kusuma, M. E., & Haryanto, I. (2019). Transformasi wilayah kepulauan di Metropolitan Jakarta. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 7(3), 181–195.
- Wolters, H. A., Gille, J., de Vet, J. M., & Molemaker, R. J. (2013). Scenarios for selected maritime economic functions. *European Journal of Futures Research*, 1(1). <https://doi.org/10.1007/s40309-013-0011-8>